

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pusat, dan Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Miranda Amelia^{1*}, Lakhariz Inuzula², Faisal³

¹⁻³ Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Indonesia

Email: mirandaamelia04@gmail.com¹, Lf.inuzula@gmail.com², faisal_pnl@pnl.ac.id³

*Penulis Korespondensi: mirandaamelia04@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the effects of local revenue, central government transfer revenue, and local expenditure efficiency on local financial autonomy in regencies and cities in Aceh Province from 2020 to 2024. The independent variables in this study include local revenue, central government transfer revenue, and local expenditure efficiency. The dependent variable in this study is local financial autonomy. The population of this study consists of all regency and city governments in Aceh Province, totaling 23 regencies and cities, during the 2020-2024 period. Sampling in this study was conducted using the saturation sampling method. This study utilized secondary data in the form of the Reports on the Implementation of the Regional Budget of Regencies and Cities in Aceh Province, and data processing was conducted using IBM SPSS Version 26 statistical software. The analysis employed multiple linear regression. The results indicate that, simultaneously, local revenue, central government transfer revenue, and local expenditure efficiency have a significant effect on local financial autonomy. Partially, the local revenue variable has a positive and significant effect on local financial autonomy; central government transfer revenue has a negative and significant effect on local financial autonomy; whereas local expenditure efficiency has no effect on local financial autonomy.

Keywords: Central Government Transfer Revenue; Local Government; Local Financial Autonomy; Local Original Revenue; Local Expenditure Efficiency;

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pusat, dan efisiensi belanja daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020-2024. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pusat, dan efisiensi belanja daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sebanyak 23 kabupaten/kota selama periode 2020-2024. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat program statistik IBM SPSS Versi 26. Metode analisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pusat, dan efisiensi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial, variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, pendapatan transfer pusat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Efisiensi Belanja Daerah; Kemandirian Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pusat.

1. LATAR BELAKANG

Transisi pemerintahan Indonesia dari orde baru ke era reformasi sejak tahun 1998 mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan melalui penerapan kebijakan desentralisasi, yang ditandai dengan peralihan paradigma dari sistem sentralistik menuju otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan diperkuat dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta didukung oleh pengaturan

perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam UU No. 33 Tahun 2004, dengan tujuan meningkatkan kemandirian daerah, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik. Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 serta diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dinilai dari tingkat kemandirian keuangan daerah yang menjadi indikator utamanya (Saragih & Nurlinda, 2023). Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerahnya secara mandiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah (Nasution *et al.* 2018). Provinsi Aceh memiliki karakteristik yang relatif berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia karena berstatus otonomi khusus dengan ruang fiskal lebih luas melalui Dana Otonomi Khusus serta Dana Bagi Hasil. Namun besarnya potensi ekonomi yang dimiliki belum sepenuhnya tercermin dalam tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah masih belum maksimal.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Belanja Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Transfer Pusat (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)
2020	2.570.775.877.183,15	11.826.017.687.067,00	13.242.212.801.894,57
2021	2.505.887.909.031,12	11.431.169.265.498,00	13.683.582.127.431,68
2022	2.917.145.003.051,96	10.775.168.990.686,00	15.773.078.722.045,63
2023	2.987.188.692.203,88	7.580.381.361.583,00	11.354.800.577.745,03
2024	3.225.685.925.856,02	8.167.778.560.238,00	11.287.148.887.851,68

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2020-2024, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 1, porsi pendapatan transfer pusat secara konsisten lebih dominan dan jauh melebihi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah. Kondisi ini menunjukkan PAD merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah yang berfungsi membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Fausi *et al.* 2025). Menurut Khasanah & Susilowati (2025), semakin besar proporsi PAD dalam APBD, semakin tinggi kemandirian suatu daerah. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah disebut Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaan otonomi daerah, ketergantungan daerah pada transfer dana dari pemerintah

pusat seperti DAU, DAK, dan DBH masih menjadi masalah, sementara efisiensi penggunaannya tidak selalu optimal (Alivia & Purwanti, 2025). Realisasi belanja daerah Provinsi Aceh tahun 2020-2024 meningkat signifikan dari 76,64% menjadi 96,70%, mencerminkan perbaikan efisiensi pelaksanaan anggaran, namun tingginya realisasi belanja tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian keuangan daerah karena pembiayaan belanja masih didominasi oleh pendapatan transfer pusat.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. PAD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Putri *et al.* 2025; Wasil *et al.* 2020; Nurjana & Pasaribu, 2023; Umasangadji, 2025). Pengaruh pendapatan transfer pusat masih beragam: Nasution *et al.* (2018) menemukan pengaruh signifikan, Ginting (2019) menemukan pengaruh yang bervariasi antarklaster, sedangkan Wasil *et al.* (2020), Putri *et al.* (2025), dan Umasangadji (2025) menemukan pengaruh negatif dan signifikan. Demikian pula pengaruh efisiensi belanja daerah masih belum konsisten; Nurjana & Pasaribu (2023) menemukan pengaruh positif pada belanja modal, sedangkan Nasution *et al.* (2018) menemukan efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Inkonsistensi temuan empiris tersebut, ditambah dengan masih terbatasnya kajian mengenai efisiensi belanja daerah sebagai indikator kualitas pengelolaan keuangan pada daerah berstatus otonomi khusus seperti Provinsi Aceh, mendorong penelitian ini dilakukan dengan periode data tahun 2020-2024 pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pusat, dan Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”.

2. KAJIAN TEORITIS

Kemandirian Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran daerah yang dikelola untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal daerah (Nasution *et al.* 2018). Berlandaskan Teori Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization Theory*) yang dikembangkan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972), pendanaan mengikuti fungsi (*money follows function*) dan perlu mempertimbangkan kesenjangan antara kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dengan kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah. Menurut Oki *et al.* (2020), kemandirian keuangan daerah merupakan keadaan di mana proses pembiayaan pelaksanaan pemerintah suatu daerah dilakukan secara mandiri dengan sumber dari pendapatan asli daerah. Rasio

kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah pada dana eksternal; semakin tinggi rasio tersebut, semakin rendah ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Saragih & Nurlinda, 2023). Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut (Saputra *et al.* 2025; Nurjana & Pasaribu, 2023):

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = (\text{Pendapatan Asli Daerah} / (\text{Pendapatan Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman})) \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 merupakan penerimaan yang bersumber dari potensi daerah sendiri, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber sah lainnya. Kemandirian keuangan daerah terkait erat dengan PAD karena kemandirian keuangan daerah merupakan rasio antara PAD dengan total penerimaan daerah, sehingga jika PAD meningkat, kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat (Komang *et al.* 2024).

Pendapatan Transfer Pusat

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, Pendapatan Transfer Pusat yang kini disebut Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk mengurangi ketimpangan fiskal, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa, dan Dana Insentif Daerah (DID). Meskipun TKD bertujuan sebagai penyeimbang kesenjangan keuangan antarwilayah, ketergantungan yang berlebihan pada dana pusat dapat memunculkan flypaper effect, yaitu kecenderungan pemerintah daerah merespons belanja menggunakan dana transfer daripada mengoptimalkan PAD (Putri *et al.* 2025).

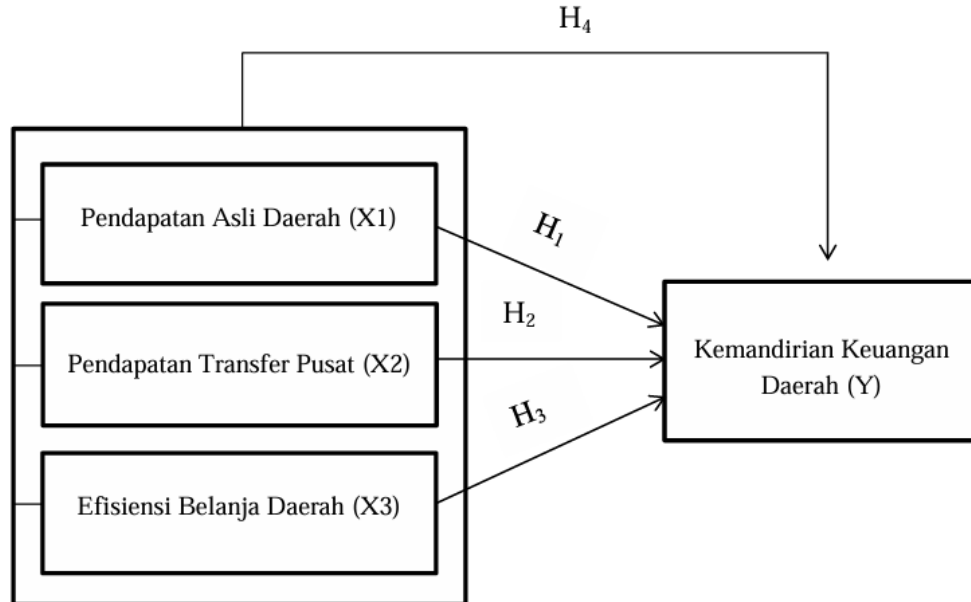
Efisiensi Belanja Daerah

Efisiensi merupakan kemampuan pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan input yang serendah-rendahnya. Teori Federalisme Fiskal (Musgrave, 1959) menegaskan bahwa belanja pemerintah harus dikelola secara optimal untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Landasan ini diperkuat oleh konsep *Value for Money* dalam kerangka New Public Management (Hood, 1991) yang berpedoman pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E), serta Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan potensi asimetri informasi antara pemerintah daerah selaku agen dengan pemerintah pusat dan masyarakat selaku prinsipal. Rumus pengukuran efisiensi belanja daerah adalah sebagai berikut (Nasution *et al.* 2018; Wahab, 2026):

$$\text{Efisiensi Belanja Daerah} = (\text{Realisasi Belanja Daerah} / \text{Anggaran Belanja Daerah}) \times 100\%$$

Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana pengumpulan data berbentuk angka-angka dan hasil penelitian dianalisis menggunakan perhitungan statistik untuk menguji pengaruh antarvariabel yang telah dirumuskan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berjumlah 23 kabupaten/kota, terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling dengan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2023). Dengan periode pengamatan lima tahun (2020-2024), total sampel awal berjumlah 115 observasi. Setelah dilakukan uji outlier, terdapat 6 observasi yang dieliminasi (Kota Banda Aceh tahun 2022-2024, Kota Langsa tahun 2024, Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2022, dan Kabupaten Aceh Timur tahun 2020), sehingga jumlah observasi akhir yang digunakan dalam analisis adalah 109 observasi.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2020- 2024, yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id), dilengkapi dengan studi kepustakaan dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software IBM SPSS Versi 26, meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas dengan nilai Tolerance dan VIF, uji heteroskedastisitas dengan Uji Glejser, dan uji autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson), analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis melalui uji parsial (uji-t), uji simultan (uji-F), dan koefisien determinasi (Adjusted R²).

Operasional Variabel

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik menggunakan PAD tanpa bergantung pada bantuan pusat atau pinjaman.	[Realisasi PAD / bantuan pusat+provinsi+pinjaman] x 100%
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Seluruh penerimaan yang digali dari potensi internal wilayah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022.	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah + Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Transfer Pusat (X2)	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.	TPP = DBH Pajak & Bukan Pajak + DAU + DAK + Transfer Pusat lainnya
Efisiensi Belanja Daerah (X3)	Kemampuan pemerintah daerah menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya.	Efisiensi = (Realisasi Belanja / Anggaran Belanja) x 100%

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber (2026)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian berdasarkan 109 observasi.

Tabel 3. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	109	24.32	26.30	25.4146	.48443
Pendapatan Transfer Pusat	109	26.81	28.42	27.5455	.39646
Efisiensi Belanja Daerah	109	74.85	98.94	93.0283	4.51283
Kemandirian Keuangan Daerah	109	5.93	23.61	11.2310	3.44102
Valid N (listwise)	109				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver.26 (2026)

Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 25,4146 dengan standar deviasi 0,48443; Pendapatan Transfer Pusat sebesar 27,5455 dengan standar deviasi 0,39646; Efisiensi Belanja Daerah sebesar 93,0283 dengan standar deviasi 4,51283; dan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 11,2310 dengan standar deviasi 3,44102, yang menunjukkan variasi data antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap nilai unstandardized residual.

Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		109
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0015699
	Std. Deviation	.00937248
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.057
	Negative	-.032
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver.26 (2026)

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga data residual berdistribusi normal dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas**Tabel 5. Uji Multikolinearitas**
Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah	.466	2.144
	Pendapatan Transfer Pusat	.467	2.144
	Efisiensi Belanja Daerah	.969	1.032

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver.26 (2026)

Seluruh nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	7.403	3.754		1.972
	Pendapatan Asli Daerah	.185	.270	.096	.685
	Pendapatan Transfer Pusat	-.704	.407	-.243	-1.731
	Efisiensi Belanja Daerah	.008	.018	.041	.419

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver.26 (2026)

Nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05 (PAD 0,495; Pendapatan Transfer Pusat 0,086; Efisiensi Belanja Daerah 0,676), sehingga disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.959 ^a	.919	.917	.99535	1.824

a. Predictors: (Constant), Efisiensi Belanja Daerah, Pendapatan Transfer Pusat, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver.26 (2026)

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,824 berada pada rentang $dU < DW < 4-dU$ ($1,7446 < 1,824 < 2,2554$), sehingga disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	9.249	5.214		1.774
	Pendapatan Asli Daerah	12.785	.376	1.383	34.046
	Pendapatan Transfer Pusat	-12.157	.565	-.874	-21.512
	Efisiensi Belanja Daerah	.023	.026	.025	.883

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver.26 (2026)

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 9,249 + 12,785X_1 - 12,157X_2 + 0,023X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 9,249 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 9,249. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,785 menunjukkan hubungan positif dengan Kemandirian Keuangan Daerah; setiap kenaikan PAD sebesar 1% meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 12,785 dengan asumsi variabel lain tetap.

Koefisien regresi Pendapatan Transfer Pusat sebesar -12,157 menunjukkan hubungan negatif; setiap kenaikan Pendapatan Transfer Pusat sebesar 1% menurunkan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 12,157. Koefisien regresi Efisiensi Belanja Daerah sebesar 0,023 dengan signifikansi $0,379 > 0,05$, artinya efisiensi belanja daerah tidak memengaruhi kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji-t)

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen menggunakan uji t, dengan kriteria: (a) jika nilai signifikansi uji $t < 0,05$, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen; (b) jika nilai signifikansi uji $t > 0,05$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t disajikan pada Tabel 9 berikut:

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8, menunjukkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah: (1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t hitung sebesar 34,046 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan demikian, uji t ini mendukung hipotesis pertama (H1 diterima). (2) Pengaruh Pendapatan Transfer Pusat terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t hitung sebesar -21,512 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti bahwa Pendapatan Transfer Pusat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan demikian, uji t ini mendukung hipotesis kedua (H2 diterima). (3) Pengaruh Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,883 dan nilai signifikansi sebesar 0,379, yang berarti bahwa Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan demikian, uji t ini tidak mendukung hipotesis ketiga (H3 ditolak).

Uji Simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan dalam penelitian. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$, maka model regresi dinyatakan layak. Hasil uji F disajikan pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Uji Simultan (Uji F) – ANOVA

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	1183.128	3	394.376	398.072
	Residual	104.025	105	.991	
	Total	1287.153	108		

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Efisiensi Belanja Daerah, Pendapatan Transfer Pusat, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: hasil olah data SPSS versi 26 (2026)

Berdasarkan Tabel 9, nilai F hitung sebesar 398,072 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga model regresi dinyatakan layak digunakan dan ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 7, nilai Adjusted R Square sebesar 0,917 (91,7%) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pusat, dan Efisiensi Belanja Daerah mampu menjelaskan 91,7% variasi Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya 8,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga H1 diterima. Temuan ini selaras dengan Teori Desentralisasi Fiskal (Musgrave, 1959; Oates, 1972) yang menekankan bahwa kemandirian fiskal daerah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber pendapatan lokalnya. Secara mekanis, PAD merupakan komponen langsung dari pembilang rasio Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga setiap peningkatan PAD akan secara langsung memperbesar nilai rasio tersebut. Hasil ini mendukung Wasil *et al.* (2020), Putri *et al.* (2025), Nasution *et al.* (2018), serta Machfud *et al.* (2020) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2013-2018.

Pengaruh Pendapatan Transfer Pusat terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Transfer Pusat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga H2 diterima. Hasil ini sejalan dengan konsep flypaper effect, di mana pemerintah daerah lebih cenderung merespons belanja menggunakan dana transfer daripada mengoptimalkan PAD (Putri *et al.* 2025). Karena Pendapatan Transfer Pusat merupakan komponen penyebut dalam rasio Kemandirian Keuangan Daerah, peningkatan nilai transfer tanpa diikuti peningkatan PAD yang proporsional akan menurunkan nilai rasio tersebut. Hasil ini mendukung Wasil *et al.* (2020), Umasangadji (2025), dan Machfud *et al.* (2020).

Pengaruh Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga H3 ditolak. Hal ini dapat dijelaskan melalui perbedaan konstruk yang diukur; efisiensi belanja mencerminkan sisi pengeluaran, sedangkan Kemandirian Keuangan Daerah diukur dari sisi penerimaan, sehingga seberapa pun efisien realisasi belanja suatu daerah, hal tersebut tidak secara langsung mengubah komposisi sumber pendapatan daerah. Kondisi ini juga relevan dengan Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan potensi asimetri informasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Hasil ini konsisten dengan Nasution *et al.* (2018).

Pengaruh Simultan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pusat, dan Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pusat, dan Efisiensi Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dengan nilai Adjusted R Square sebesar 91,7%. Hasil ini sejalan dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal ditentukan oleh kemampuan daerah mengelola sumber pendapatan lokal mengoptimalkan transfer sebagai instrumen penyeimbang, dan mengelola belanja secara efisien. Kontribusi positif PAD tetap lebih dominan dibandingkan pengaruh negatif Pendapatan Transfer Pusat, sehingga optimalisasi PAD menjadi strategi utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hasil ini mendukung Nasution *et al.* (2018), Putri *et al.* (2025), dan Umasangadji (2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2020-2024, sehingga H1 diterima. Pendapatan Transfer Pusat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga H2 diterima. Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga H3 ditolak. Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pusat, dan Efisiensi Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga H4 diterima.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh perlu terus mengoptimalkan penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer pusat. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan periode pengamatan, serta menambahkan variabel lain seperti belanja modal atau pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Alivia, S., dan Purwanti, M. (2025). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Pada Kemandirian Keuangan Daerah. *Proceeding Frima (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 01(08), 2339-2345.
- Fausi, D., Syarif, M., dan Tajuddin. (2025). Analisis Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kemandirian Fiskal Di Kabupaten Konawe. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 10(1), 22-32.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Ginting, A. M. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4, 105-127.
- Khasanah, P. C., dan Susilowati, L. (2025). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 747-758.
- Komang, N., Anjani, S., Agung, A., dan Ayuningsasi, K. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 1431-1445.
- Machfud, Asnawi, dan Naz'aina. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-Mind)*, 5(1), 14-31.
- Nasution, A. P., Handoko, B., dan Pohan, I. R. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 192-206.
- Nurjana, D., dan Pasaribu, L. D. (2023). Pengaruh Derajat Kontribusi PAD Dan Rasio Efisiensi Belanja Modal Terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten). *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 6(1), 109-121.
- Oki, K., Nalle, F. W., dan Meomanu, A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1-6.

- Putri, O., Yantiana, N., dan Desyana, G. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(2), 2362-2384.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Depkeu, Jakarta.
- Saputra, E., Sastrawan, R., dan Patria, A. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 10(1), 97-106.
- Saragih, R., dan Nurlinda. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas Fiskal Pada Kabupaten Tapanuli Utara Dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022 Di Indonesia. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(2), 1-11.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Umasangadji, U. (2025). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 64-71.
- Wahab, O. L. A. (2026). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 145-153.
- Wasil, M., Putri, N. S., Larasati, A., dan Mufida, N. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal Of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 99-109.